



BPK Harap Pemerintah Jadi *Role Model* Terkait Isu Korupsi

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berharap pemerintah dapat menjadi contoh dalam pencegahan korupsi dengan memulai dari diri sendiri. Hal ini disampaikan Ketua BPK Isma Yatun dalam Rapat Pembekalan Menteri Kabinet Merah Putih yang diselenggarakan oleh Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto.

"Besarnya harapan saya, agar pemerintah dapat menjadi *critical juncture* sekaligus *role model* dalam pencegahan korupsi yang dimulai dari diri sendiri dan dari sekarang, karena *that government is the strongest of which everyone feels themselves a part*," kata Isma di Jakarta, belum lama ini.



"BPK berperan aktif dan memiliki kontribusi signifikan terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi (tipikor). Hal ini karena BPK berwenang menghitung, menilai, dan/atau menetapkan kerugian negara dalam penggunaan anggaran oleh suatu entitas."

Ketua BPK, Isma Yatun

Turut hadir dalam pembekalan itu Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, Wakil Ketua BPK Budi Prijono, para menteri koordinator, menteri, wakil menteri, penasihat khusus, kepala badan, utusan khusus, dan staf khusus Kabinet Merah Putih.

Pada kesempatan itu, Ketua BPK juga menegaskan pentingnya peran BPK. Khususnya dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara guna mendukung stabilitas ekonomi dan sosial, serta meminimalkan risiko korupsi.

Dalam pertemuan tersebut, Ketua BPK menguraikan tugas BPK dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Hal ini meliputi tiga jenis pemeriksaan utama, yaitu pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT).

Ia pun menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan BPK akan menghasilkan opini, rekomendasi, serta simpulan. Hal-hal ini yang berkontribusi dalam pencegahan korupsi di setiap tahap pengelolaan keuangan negara.

"BPK berperan aktif dan memiliki kontribusi signifikan terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi (tipikor). Hal ini karena BPK

berwenang menghitung, menilai, dan/atau menetapkan kerugian negara dalam penggunaan anggaran oleh suatu entitas," ujar Ketua BPK.

Dijelaskan juga bahwa BPK pun berkomitmen melaporkan temuan yang mengandung indikasi pidana kepada instansi berwenang. Termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, dan kepolisian.

Sejak 2017 hingga 28 Juni 2024, BPK telah menyampaikan 29 laporan investigatif dengan nilai indikasi kerugian mencapai Rp32,9 triliun. Termasuk juga 437 laporan penghitungan kerugian negara dengan nilai kerugian sebesar Rp61,19 triliun.

Ketua BPK mengapresiasi dukungan dari para pimpinan entitas terkait untuk mempercepat tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK. Hal ini sebagaimana telah diamanatkan dalam pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004.

Ia pun menekankan bahwa penerapan tata kelola yang baik merupakan kunci dalam menjaga stabilitas ekonomi serta membantu pemerintah mengalokasikan sumber daya dengan efisien.